



## LAPORAN

# **FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 PADA UPTD. KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI**

UPTD. KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**  
Jl. Patimura No. 77 Tlp. 0361 227926 Fak 0361 223562 DENPASAR

# **2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat karunia dan rahmat-Nya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali Tahun 2023 dapat kami selesaikan tepat waktu.

Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk / bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintah, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat yang berad di sekitar lingkungan UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perndayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Foruk Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Pentelenggra Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbang saran dan ide yang membangun demi peningkatan pelayanan public.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat pengguna layanan pada UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali.

Denpasar, 9 November 2023

Kepala UPTD. Kawasan Konservasi  
Provinsi Bali



Ir. I Nengah Bagus Sugiarta  
NIP. 19681201 199303 1 011

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Dasar Pelaksanaan .....	2
3. Tujuan dan Manfaat .....	2
4. Ruang Lingkup.....	3
B. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik .....	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP .....	4
3. Metode Pelaksanaan.....	4
4. Susunan Acara .....	6
C. Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik .....	7
D. Penutup .....	12

**LAPORAN**  
**FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**  
**PADA UPTD. KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggaran pelayanan publik dengan publik. UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali merupakan salah satu UPTD yang dibentuk oleh Gubernur Bali Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Tugas dan fungsi UPTD KKP Bali mengemban visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, khususnya *Segara Kerthi*, yaitu dengan menjaga kesucian dan keharmonisan sumberdaya laut beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat pesisir yang sejahtera sekala-niskala. Disamping itu juga mengemban amanah Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut. Wilayah kerja UPTD KKP Bali adalah wilayah KKP yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan yaitu Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida di Provinsi Bali dikelola sebagai Taman Wisata Perairan dengan luas 20.057 Ha. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Taman wisata perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

Sebagai Penyelengara Pelayanan Publik, UPTD. KKP Bali wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelengara Pelayanan Publik, bahwa peran serta masyarakat dalam kegiatan

penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

## **2. Dasar Pelaksanaan**

Sebagai dasar pelaksanaan FKP pada UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali adalah :

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b) Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/188/PP.06/2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2023 dan Laporan Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2022

## **3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat FKP secara umum adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

Manfaat FKP khusus bagi Penyelenggara Pelayanan UPTD. KKP Bali adalah :

- a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan di rumuskan dan ditetapkan
- b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d. mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f. Mendapat masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

Manfaat FKP khusus bagi Masyarakat/Publik adalah :

- a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
- b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan
- c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan,
- d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara pelayanan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

#### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam Pembahasan dan penyelenggaraan FKP meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Pemberian penghargaan;
- e. Survei kepuasan masyarakat; dan
- f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

## **B. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

a. Waktu Penyelenggaraan :

Hari / Tanggal : Rabu, 8 November 2023

b. Tempat Pelaksanaan :

Forum Konsultasi Publik di Laksanakan secara daring menggunakan Zoom Meeting

### **2. Penyelenggara dan Peserta FKP**

Penyelenggaran kegiatan FKP ditetapkan oleh Kepala UPTD. KKP Bali sebagaipimpinan Unit Pelayanan Publik. Sebagai penyelenggara FKP adalah dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Bali
Ketua	:	Kepala UPTD KKP Bali
Sekretaris	:	Kepala Sub Bag TU
Bagian Informasi Publik	:	Kasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
Bagian Pelaksana	:	Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat
Administrasi/Perlengkapan	:	Staf UPTD KKP Bali

Peserta yang di undang sebanyak 100 terdiri dari para pihak yang terlibat meliputi pengguna layanan (masyarakat / pengusaha wisata bahari), stakeholder pelayanan publik, ahli/praktisi (Perguruan Tinggi, Peneliti), Organisasi Masyarakat Sipil (LSM/NGO, Desa Adat, Pegiat / Pelestari Lingkungan / Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK), Media massa (cetak/digital) yang ada disekitar Kawasan Konservasi Perairan Bali.

### **3. Metode Pelaksanaan**

Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Meeting yang merupakan kegiatan diskusi antara penyelenggara layanan (UPTD.KKP Bali). Dalam diskusi penyelenggara layanan mencatat semua masukan, saran dari peserta. Hasil tersebut akan dituangkan dalam berita acara hasil FKP.

Pelaksanaan FKP pada UPTD KKP Bali dilaksanakan melalui Zoom Meeting dengan melibatkan stakeholder pada kawasan konservasi. Dua tahapan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah sebagai berikut

a. Pra Pelaksanaan, meliputi kegiatan :

- 1) Membentuk Tim Persiapan (SK Kepala Dinas)
- 2) Merumuskan konsep kegiatan :
  - Taget dan sasaran yang akan dicapai (Pelayanan Pengawasan dan Penanganan Tindaklanjut, Efektivitas Pungutan Retribusi Jasa Usaha)
  - teknis (bersifat dialogis)
  - Jumlah peserta (35 – 50 orang)
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk mengambil tema/isu permasalahan (SKM pengawasan dan penanganannya, pungutan retribusi jasa usaha).

No	ASPEK	PENDUKUNG	Penanggung Jawab
1	Penetapan Sektor untuk melaksanakan FKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hasil SKM</li> <li>✓ Hasil Pengaduan/Laporan</li> <li>✓ Sorotan media cetak/elektronik</li> <li>✓ Sorotan media sosial</li> <li>✓ Perbincangan di masyarakat</li> </ul>	Kepala UPTD KKP Bali
2	Penetapan Tim Pelaksana	Surat Tim Pelaksana FKP	Kepala UPTD KKP Bali
3	Membuat Perencanaan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tema FKP</li> <li>✓ Waktu dan Tempat</li> <li>✓ Peserta</li> <li>✓ Format Berita Acara serta komitmen Tindaklanjut</li> <li>✓ Anggaran</li> </ul>	Tim Pelaksana FKP
4	Melaporkan Rencana FKP kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	✓ Rencana Pelaksanaan	Tim Pelaksana FKP
5	Persiapan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Undangan Peserta</li> <li>✓ Daftar Hadir Peserta</li> <li>✓ Susunan Acara</li> <li>✓ Penataan Ruangan</li> <li>✓ Kepanitiaan FKP</li> </ul>	Tim Pelaksana FKP

b. Pelaksanaan

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP yang harus dipenuhi, antara lain Sederhana, Partisipatif, Transparansi, Keadilan, Akuntabel, dan Berkelanjutan. Pada pelaksanaan FKP UPTD. KKP Bali dengan publik untuk membahas Forum Konsultasi Publik Kawasan

Konsrvasi Perairan Nusa Penida untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan dilaksanakan berupa *Zoom Meeting* yang merupakan bentuk pertemuan secara daring antara penyelenggara pelayanan (UPTD. KKP Bali) dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

- Diskusi dilakukan secara 2 arah (dialog) ;
- Pembahasan masalah fokus pada pemecahan masalah mencari solusi permasalahan;
- Hasil keputusan bersama diketahui oleh semua peserta FKP;
- Dilakukan SKM kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP;
- Dilakukan pengawasan oleh masyarakat;
- Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada pimpinan instansi;

#### 4. Susunan Acara

Susunan acara pada FKP UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

No	ASPEK	PENDUKUNG	Penanggung Jawab
1	Pembukaan	✓ Susunan Acara	Kepala UPTD KKP Bali Tim Pelaksana
2	Pengantar	✓ Susunan Acara ✓ Doa ✓ Pembukaan oleh Kadis KP Bali	Moderator
3	Paparan mengenai Program, Tupoksi, Strategi dan Permasalahan di UPTD. KKP Bali	✓ Materi Paparan	Kepala UPTD KKP Bali
4	Tanggapan, masukan, saran dari pengguna layanan dan OPD terkait	✓ Mekanisme diskusi (tanya jawab) antara masyarakat dan penyelenggara layanan	Moderator
5	Perumusan Berita Acara atau komitmen tindak lanjut perbaikan oleh Tim Perumus	✓ Mengakomodir masukan, saran dari masyarakat (pengguna layanan)	Tim Pelaksana FKP
6	Penandatanganan Berita acara atau Komitmen	✓ Berita Acara atau Komitmen yang telah dicetak	Tim Pelaksana FKP

### **C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023 dimana kegiatan Forum Konsultasi Pulik pada UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali laksanakan secara daring menggunakan Zoom Meeting, yang di hadiri oleh OPD (Bapend Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali), Pelaku usaha wisata bahari di Nuas Penida, LSM/NGO ( Coral Triangle Center) serta dari UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali.

1. Paparan Materi Terkait dengan FKP dengan mengambil topik Melalui Pengelolaan Kawasan Kosnervasi yang Efektif akan Memberikan Manfaat Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang disampaikan oleh Narasumber Ka.UPTD KKP Bali :

Narasumber : Kepala UPTD KKP Bali (Pak I Nengah Bagus Sugiarta) memaparkan tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) Pada UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali. Dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 39) mnegamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan terkait yaitu :

1. Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan dan masyarakat selaku penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. Tujuan diadakannya FKP yaitu memperoleh pemahaman hingga solusi atas permasalahan yang ada dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Manfaat FKP secara umum yaitu menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

Tema dari FKP UPTD KKP Bali adalah 'Melalui Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Efektif Akan Memberikan Manfaat Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat'. Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik. UPTD KKP telah melakukan SKM dengan sasaran stakeholder terkait dan masyarakat pesisir yang memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan di KKP Nusa Penida dengan mendapatkan nilai IKM total 87,08 (Baik).

Permasalahan dan Kendala di UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali yaitu :

**Tata Kelola :**

1. Penatakelolaan Kelembagaan (Pembentukan SUOP Baru) – KK Buleleng, KK Karangasem dan KKM Teluk Benoa;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sesuai Kompetensi dan Pelatihan)
3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur (Biaya Operasional)
4. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan (RZ, COC manta/mola, lumba2, ship wreck)
5. Pengembangan kerjasama organisasi/ kelembagaan masyarakat (MoU – KB – PKS)
6. Pengembangan kemitraan (PT, BRIN, LSM/NGO, POKMASWAS, Desa Adat)
7. Pembentukan Jejaring KK (OPD, LSM/NGO, KOMPAK, Lintas Daerah)
8. Revisi / Unifikasi Perda PDRB (Tahun 2024) sesuai amanat UU 1/2022 tentang HKPD
9. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan /PES (Efektivitas implementasi PERDA Retribusi Jasa Usaha, Pembentukan BLUD)

**Sumberdaya :**

1. Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan (Perusakan oleh aktivitas wisata bahari)
2. Restorasi dan rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan (LSM, KOMPAK, CSR,
3. Penelitian dan Pengembangan (Daya Dukung / Daya Tampung dive site)
4. Pemanfaatan sumberdaya ikan (sesuai zonasi, IUU Fishing, Budidaya rumput laut)
5. Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan (Mangrove, Terumbu Karang, Ikan eksotis)

6. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya (Patroli Bersama – POKMASWAS – APH (Pol PP, POLAIR, TNI-AL))

**Sosial, Ekonomi, Budaya :**

1. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat (ekowisata ramah lingkungan, budidaya rumput laut)
2. Pemberdayaan Masyarakat (Bintek, pelatihan, sosialisasi sasaran Kelompok Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah ikan, PUGAR, POKMASWAS)
3. Pelestarian adat dan budaya (Melasti, Pura Segara, Nyepi Segara, Pecalang Segara)

UPTD KKP Bali telah menampung aduan dari masyarakat yang ada di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, antara lain : Masih adanya laporan penangkapan tidak ramah lingkungan (IUU Fishing), Penggunaan dan penurunan jangkar secara sembarangan, Wisatawan belum mentaati kode etik dalam berinteraksi dengan mola, manta dan biota eksotik lainnya, Sampah plastik / fenomena sampah pada saat musim hujan, Mooring Bouy belum tertata, Perda 7/2021 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi perlu disosialisasikan secara terus menerus dan berkelanjutan, Patroli dan pengawasan perlu diintensifkan, Pelayanan Perizinan Dasar (Verifikasi Teknis SUOP) - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut / Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut

Adapun layanan dan rencana layanan pada UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali, yaitu :

1. Patroli pengawasan sumberdaya dan pemanfaatannya,
2. Pemanfaatan pos jaga KKP (crystal bay dan batununggul),
3. Optimalisasi e-ticket- kerjasama dengan bpd bali (atixbali.com)-pembayaran internasional,
4. Optimalisasi pemanfaatan pusat informasi kkp
5. Pengaturan dan pentaan daya dukung dive site
6. Pengaturan pemasangan mooring bouy
7. Koordinasi lintas OPD layanan keselamatan pengunjung (kerjasama dgn ksop-dispar)

2. Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat

Tanggapan dan masukan dari masyarakat terangkum dalam beberapa catatan sebagai berikut :

Tanggapan/Saran

Dari

Topan (Dune Dive  
Penida)

Kami berencana akan melakukan coral restoration di Nusa Penida. Bagaimana alur dalam membuat surat izin ? berapa lama proses untuk membuatnya ? Apakah ada biaya dalam proses membuatnya ?

Jawaban  
Pak Nengah  
(UPTD KKPB)

Kewenangan dalam membuat izin sebenarnya merupakan kewenangan pusat. Mengajukan izin secara online melalui OSS. Untuk verifikasi teknis melalui SUOP yang penjelasannya lebih lanjut bisa menghubungi BPSPL. Sebelum verifikasi teknis sebaiknya siapkan proposal dan survei tempat penanaman apakah sudah sesuai dengan zona peruntukannya. Jika hanya untuk penanaman saja sepertinya tidak membayar. Tetapi jika peruntukan untuk usaha yang terdapat diruang laut biayanya 18.000 per meter atau Rp 18.000.000 juta per hektare. Kita di UPTD hanya memberikan surat keterangan dan memverifikasi lapangan untuk meyakinkan dari pihak pusat bahwa lokasi sudah sesuai.

Ray (Freedive  
Nusa)

Jumlah boat di Manta Bay sangat banyak, jarak boat dengan customer sangat dekat. Operator yang tidak tau aturan adalah operator yang tidak memiliki ijin. Mereka mensandarkan kapal dekat dengan cleaning station. Sudah 3 minggu tidak ada manta di manta by dan manta point. Saya minta tolong buat aturan atau regulasi untuk cara menurunkan dan menjemput tamu. Kami menurunkan tamu jaraknya 50 meter dari cleaning station

Jawaban  
Pak Nengah  
(UPTD KKPB)

Sudah pernah kami melakukan patroli di cleaning station. Kami sedang melakukan upaya dalam mengatur jumlah pengunjung melalui Eticket. Kita akan mencoba untuk mengatur jumlah pengunjung yang membeli tiket. Jika kuota sudah penuh pada hari itu, maka pengunjung tidak bisa membeli tiket. Dan kita akan mengatur agar pariwisata dapat merata tidak hanya ke Nusa Penida saja.

Natasya (Blue  
Corner Dive)

Bisa diberikan penjelasan tentang pembayaran dengan etiketing. Apakah sudah bisa membayar dengan bank account dari luar negeri ?

Jawaban  
Pak Nengah  
(UPTD KKPB)

Kita sudah melakukan sosialisasi bersama dengan BPD. Proses membeli tiket dengan etiketing lebih mudah. Nanti kita akan memberikan pdf proses membeli tiket dengan atixbali.com. kita sedang berupaya untuk memasukkan master card di atixbali.com sehingga mengaktifkan dalam pembayaran melalui etiket.

Topan (Dune Dive  
Penida)

Apa tidak sebaiknya pembayaran melalui pintu masuk matahari terbit dan Padangbai. Tidak dive operator yang meminta wisatawan untuk membayar tiket

Jawaban  
Pak Nengah  
(UPTD KKPB)

Sudah kami laksanakan dan kami sudah ke KSOP yang mengatur tentang Pelabuhan. Pihak KSOP mengatakan sulit untuk menempatkan petugas karena takutnya akan kredit dan akan menghambat waktu keberangkatan.

Fisson (Deep Roots  
dive)

Waktu saya ke Pelabuhan sampalan disana ada bayar tiket masuk. Apa perbedaanya dengan retribusi ?

Jawaban

Tiket yang di Pelabuhan untuk wisata di daratan dan itu merupakan kewenangan dari kabupaten. Sedangkan

Pak Nengah  
(UPTD KKP Bali)

retribusi untuk pembayaran tiket masuk ke Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida. Perairan 0-12 mil merupakan kewenangan dari Provinsi. Saya meminta kesadaran dari dive operator untuk ikut Bersama-sama berkontribusi dalam pembayaran retribusi.

3. Berita Acara Tindaklanjut Perbaikan

Sebagai tindaklanjut dari permasalahan (tanggapan dan masukan dari masyarakat) maka UPTD KKP Bali kedepannya akan meningkatkan layanan dengan berkoordinasi pihak terkait, mencari pendanaan diluar APBD Provinsi Bali seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, LSM maupun sumber lain yang sah dalam ikut serta pengelolaan kawasan konservasi perairan Bali.

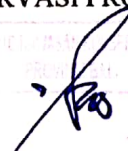
Hasil penyelenggaraan FKP pada UPTD KKP Bali dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan public (Belum disusun).

**D. PENUTUP**

Laporan hasil penyelenggaraan FKP dimaksud, disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- LAMPIRAN I Berita Acara Forum Konsultasi Publik
- LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir
- LAMPIRAN III Surat Undangan
- LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan
- LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP yang Telah Dilaksanakan Pada Tahun Sebelumnya
- LAMPIRAN IV Notulensi

Bali, 10 November 2023  
KEPALA UPTD. KAWASAN  
KONSERVASI PROVINSI BALI

  
Ir. I NENGAH BAGUS SUGIARTA  
NIP. 19681201 199303 1 011



ආණ්ඩුපාලන සභාව  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
භූමි සම්පත් සහ මත්ස්‍ය මාලිගා විකුණුම්  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ලාංඡන සහ සම්පත් කළමනාකරණ සභාව  
UPTD. KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI  
ආණ්ඩුපාලන සභාව, පොදු සේවා මණ්ඩල (020600) ලක්ෂ්‍ය මාර්ග  
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR, TELEPON (0361) 227826  
email. uptdkkpprovbali@gmail.com

**Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)  
UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali**

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan secara daring via Zoom Meeting oleh para pihak penyelenggara layanan, pengguna layanan, masyarakat / pengusaha wisata bahari), OPD terkait (Bapenda Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali), Organisasi Masyarakat Sipil (LSM/NGO, Pegiat / Pelestari Lingkungan / Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK), Akademisi yang ada disekitar Kawasan Konservasi Perairan Bali yang menghasilkan beberapa masukan berserta solusi kepada Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali sebagai berikut :

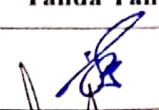
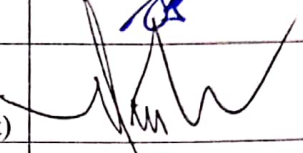


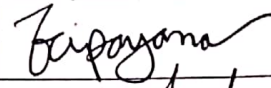
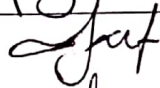


No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan Layanan	Target Waktu Pelaksanaan
1	Belum optimalnya wisatawan /wajib retribusi dalam pembelian tiket masuk ke Kawasan Konsevasi Perairan Nusa Penida	Penambahan fitur pembayaran Internasional dan pemuatan juknis pembayaran internasional	Januari – Desember 2024
2	Belum optimalnya verifikasi teknis PKKPRL / KKRL di Kawasan Konservasi	Verifikasi ke lapangan dengan membuat Surat Keterangan sesuai dengan peruntukan zonasi Kawasan Konservasi	Januari – Desember 2024
3	Perubahan Zonasi menurut Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi	Mengusulkan anggaran untuk merevisi Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida	Januari – Desember 2024

Kepala UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan layanan publik yang berkualitas.

Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres perbaikan yang dilakukan oleh Kepala UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sesuai usulan rekomendasi layanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan.

**Peserta Forum Konsultasi Publik UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali**

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Ir. I Nengah Bagus Sugiarta	Penyelenggara Layanan (Kepala UPTD KKP Bali)	
	A.A. Raka Ayu Mirah, Spi, MSi	Penyelenggara Layanan (Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat)	
	I Ketut Merta, SP	Penyelenggara Layanan (Kasi Pengelolaan Kawasan Konservasi)	
	I Dewa Ketut Widana, SH, MH	Penyelenggara Layanan (Kasubag TU)	
	I G.A. Nyoman Tripayana, S.Kom	Penyelenggara Layanan (Staf UPTD. KKP)	
	Kadek Kharna Paundra, S.Tr.Pi	Penyelenggara Layanan (Staf UPTD. KKP)	
	Dewa Ayu Laksmi Sawitri, S.Pi	Penyelenggara Layanan (Staf UPTD. KKP)	
	Dwi Kurnia, S.Pi	Penyelenggara Layanan (Staf UPTD. KKP)	
2	Murfi	Pengguna Layanan (Pure Dive Resort – Nusa Penida)	Zoom Meeting
	Nyoman Riana	Pengguna Layanan (Lembongan Watersport)	Zoom Meeting
	Stave	Pengguna Layanan (Two Fish Divers)	Zoom Meeting
	Agus Pradnyan	Pengguna Layanan (French Kiss Divers)	Zoom Meeting
	Danielle Drury	Pengguna Layanan (Scuba Junkie Penida)	Zoom Meeting
	Ray	Pengguna Layanan (Freedive Nusa)	Zoom Meeting
	Julia	Pengguna Layanan (Purple Dive Penida)	Zoom Meeting
	Hatopan Gabriel	Pengguna Layanan (Dune Penida)	Zoom Meeting
	Poppy Siregar	Pengguna Layanan (Octopus Dive)	Zoom Meeting
	Esa	Pengguna Layanan (World Divinf Lembongan)	Zoom Meeting
	Ni Made Diah Pradnyasuari	Pengguna Layanan (Bounty Cruises)	Zoom Meeting

	David McClinton	Pengguna Layanan (Ceningan Divers)	Zoom Meeting
	Purnawati	Pengguna Layanan (Two Fish Divers)	Zoom Meeting
	Thea	Pengguna Layanan (Octopus Dive)	Zoom Meeting
	Fisson	Pengguna Layanan (Deep Roots Dive)	Zoom Meeting
3	Wira Sanjaya	Coral Triangle Center (CTC)	Zoom Meeting
4	Ni Wayan Esti	Stakeholder Lainnya (Dispar Prov. Bali)	Zoom Meeting
	I Made Suditha	Stakeholder Lainnya (Bapenda Prov. Bali)	Zoom Meeting

Kepala UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali



Ir. I Nengah Bagus Sugiarta  
NIP. 19681201 199303 1 011

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali




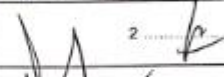
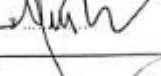


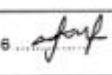
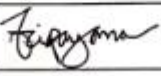

Ir. Putu Sumardiana, MP  
NIP. 19670714 199403 1 003

## Lampiran 2. Salinan Daftar Hadir

<input type="checkbox"/>	wira sanjaya	coral triangle center	08123815109
<input type="checkbox"/>	Ni Made Diah Pradnyasuari	Bounty Cruises	085888070827
<input type="checkbox"/>	Purple Dive	Selam	081999715771
<input type="checkbox"/>	I Ketut Merta	UPTD KKP Bali	089608225119
<input type="checkbox"/>	Hatopan Gabriel, S.Kel	Dune Penida Dive Center	081339287734
<input type="checkbox"/>	Ray	Freedive Nusa	+6285174182889
<input type="checkbox"/>	ni wayan Esti Ekarini Rahayu,SS.,M.Hum	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	081338406756
<input type="checkbox"/>	Eklesia Poku (Esa)	PT. Dunia Selam Lembongan (World Diving)	628123900686
<input type="checkbox"/>	I Gd Agus Pradnyan Suteja .S.S	French Kiss Divers	081337371818
<input type="checkbox"/>	David McClinton	Ceningan Divers	+628113897701
<input type="checkbox"/>	Poppy Siregar	Octopus Dive	087882228198
<input type="checkbox"/>	Danielle Drury	Scuba Junkie Penida	08113907078
<input type="checkbox"/>	Purnawati	Two Fish Divers	081916260650
<input type="checkbox"/>	I Putu Yudi Hendri Artika Pebrianta	Pelaku usaha wisata bahari	085256994858
<input type="checkbox"/>	I Made Suditha	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	081353239600
<input type="checkbox"/>	Steve wiles	two fish divers	081237571834
<input type="checkbox"/>	Putu Fisson Sila Hari	Deep Roots Dive and Yoga Resort	081246876327

### Daftar Hadir Via Zoom Meeting

**DAFTAR HADIR  
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023  
UPTD. KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI  
Denpasar, 8 November 2023**

NO.	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	IND. Sugianta	Ka. UPTD KKP Bali	1 
2	I Dewa ketut widana	Ko Pub bog TU	2 
3	A.A. Ayu RAICA MIRAH	KASI. PPM. UPTD. KKP	3 
4	I KETUT MERTA	KASI PENGELOLAAN KKP.	4 
5	Dwi Kurnia	Staff UPTD. KKP	5 
6	Kadek Kharnataundra	Staff UPTD KKP	6 
7	I G. A. Nym Tripayana	Staff UPTD. KKP	7 
8	Daw Ayu Laksmi S	Staff UPTD KKP	8 

1Daftar Hadir FKP UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali



### DAFTAR UNDANGAN

#### 1. Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi Provinsi Bali

No	Nama/Instansi	Ket (Orang)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	1
2	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali	1
3	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	1
4	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	1
5	Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bena	1
6	Direktur Yayasan Coral Triangle Center (Project Leader Nusa Penida)	1
7	Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	1
8	Kepala Bidang Pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali	1
9	Kepala Bidang Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali	1
10	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali	1
11	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemerdayaan Masyarakat UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	1
12	Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali	1

#### 2. Lembaga / Instansi Pemerintah Daerah / Kelompok Masyarakat

No	Nama/Instansi	Ket (Orang)
1	Kepala Kepolisian Sektor Nusa Penida	1
2	Komandan Rayon Militer Nusa Penida	1
3	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	1
4	Camat Nusa Penida	1
5	Perbekel Desa Ped	1
6	Perbekel Desa Toyapakeh	1
7	Perbekel Desa Batununggul	1
8	Perbekel Desa Kutampi Kaler	1
9	Perbekel Desa Sakti	1
10	Perbekel Desa Suana	1
11	Bendesa Adat Ped	1
12	Bendesa Adat Nyuh Kukuh	1
13	Bendesa Adat Sakti	1
14	Perbekel Desa Lembongan	1
15	Perbekel Desa Jungutbatu	1
16	Bendesa Adat Lembongan	1
17	Bendesa Adat Jungubatu	1
18	Ketua LACCA Lembongan	1
19	Ketua Kelompok Segara Jaya Lembongan	1



20	POKMASWAS Batununggul Lestari	1
21	POKMASWAS Segara Mejineng	1
22	POKMASWAS Gili Bhuana	1
23	POKMASWAS Baruna Jaya	1

### 3. Pelaku Usaha Wisata Bahari

No	Nama/Instansi	Ket (Orang)
1	Rhonda Snorkeling Tour Nusa Penida	1
2	Deep Roots Dive	1
3	Nusa Penida Divers	1
4	Temple Dive	1
5	Octopus Dive	1
6	Nusa Penida Dive Center	1
7	Dune Penida	1
8	Karma Dive	1
9	Bhaisnawa Snorkeling	1
10	Purple Dive	1
11	Reeflex Divers	1
12	Nomads	1
13	Bluecorner Dive Nusa Penida	1
14	Kardi Express	1
15	Mambo Dive Resort	1
16	Scuba Junkie	1
17	DPM Dive	1
18	Pure Dive Resort	1
19	Sanctum Dive	1
20	Bali Aqua	1
21	Freedive Nusa	1
22	Blue Whales	1
23	Penida Dive	1
24	Serot Snorkeling	1
25	Batman Snorkeling	1
26	Ganus Expres Snorkeling	1
27	Kawan Snorkeling	1
28	Ocean Riders	1
29	Olas Asih Snorkeling	1
30	Suana Point Crouse	1
31	Suana Point Family 3	1
32	Yuna Snorkeling	1
33	Nusa Penida Explore	1
34	Burak Snorkeling	1
35	Nusa Scuba Dive	1
36	Legend Dive	1
37	Ocean Star	1
38	PT. Caspla Bali	1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

39	Semaya One	1
40	Scuba Center Asia	1
41	Bali Hai Dive	1
42	Tamarind Dive	1
43	Siren Diving	1
44	Twin Island Dive	1
45	Ceningan Diver	1
46	Dive Concepts	1
47	Bali Dive Academy	1
48	Lembongan Discoveri Diving	1
49	Blue Corner Dive	1
50	Lembongan Dive Center	1
51	Roctopus Dive	1
52	Two Fish Diving	1
53	World Diving Lembongan	1
54	Lembongan Divers	1
55	French Kiss Divers	1
56	Sober Diving	1
57	Big Fish Diving	1
58	Lembongan Water Sport	1
59	Legend Dive	1
60	Mola Mola Dive	1
61	Capten Coconat	1
62	Capten Yurik	1
63	Aquaman Snorkeling Trip	1
64	Lembongan Snorkeling Trip	1
65	New Man	1
66	D&B Ocean Dream	1
67	Kelompok Surya Mandiri Mangrove	1
68	Nirvana	1
69	Capten Blang	1
70	Lembongan Surf Time	1
71	Bounty Cruises	1
72	Quick Silver	1
73	Big Blue Lembongan	1
74	Cap Xsuman	1
75	Java Activity	1
76	Lembongan Snorkeling & Tour	1
77	Sea Brid Diving	1
78	Adi Activity	1
79	Dinatah Ocean	1
80	Tanis	1
81	TS Snorkeling	1
82	Royal Outrigger	1
83	Arjun.S	1
84	Nusa Paradise Adventure	1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

85	Nusa Island	1
86	LE Nusa	1
87	Kinara Snorkeling	1
88	Blue Lagoon Snorkeling	1
89	Ceningan Paradise	1
90	Ceningan Snorkeling	1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

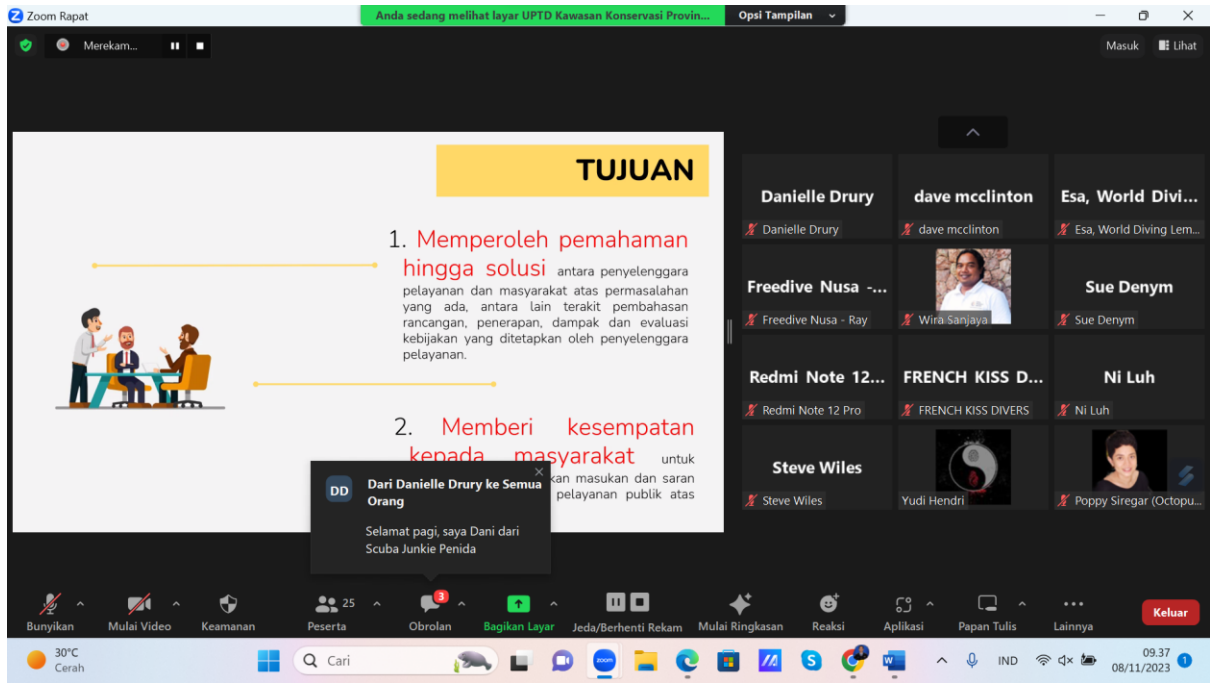
## Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan

The screenshot shows a Zoom meeting window. The main content is a slide titled "LATAR BELAKANG" (Background) for a "FORUM konsultasi" (Consultation Forum). The slide text reads: "Untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan dan masyarakat selaku penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan publik yang adil, transparan, dan akuntabel" and "Peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik". The slide also features a graphic with the words "FORUM konsultasi" and icons of people wearing masks. To the right of the slide is a grid of 12 participant thumbnails. The participants listed are: UPTD. KKP Bali, UPTD KKP De..., Topan - Dune P..., I Ketut Merta, i nyoman riana, Dinas Pariwisata..., OPPO CPH2333, Dewa Ayu KKP, and Participant. The Zoom interface at the bottom shows various controls like "Bunyikan", "Mulai Video", "Keamanan", "Peserta", "Obrolan", "Bagikan Layar", "Jeda/Berhenti Rekam", "Mulai Ringkasan", "Reaksi", "Aplikasi", "Papan Tulis", and "Lainnya". The system tray at the bottom indicates a temperature of 30°C and the date 08/11/2023.

Dokumentasi Peserta Zoom Meeting

This screenshot shows another view of the same Zoom meeting. The slide content is identical to the first screenshot, including the "LATAR BELAKANG" title and the text about public service quality improvement. The grid of participants is different, listing: Bounty Cruises, Danielle Drury, dave mcclinton, Esa, World Divi..., Freedive Nusa..., Sue Denym, Redmi Note 12..., Ni Luh, Steve Wiles, and FRENCH KISS D... The Zoom interface and system tray are consistent with the first screenshot, showing the same controls and system information (30°C, 08/11/2023).

Dokumentasi Peserta Zoom Meeting



Dokumentasi Peserta Zoom Meeting





ບົຍນິກຊຸງ ກູບຽບິກຸວິ ທາລິ  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
ຂົນສົ່ງ ສົນທຸງທາລິ ຂາລິ ບົນິກຸຂາລິ  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
ຊຸງບຸກ ກູບຸກ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ  
**UPTD. KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI**  
ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ  
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR, TELEPON (0361) 227926  
email: uptdkkprovbali@gmail.com

**LAPORAN TINDAKLANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI**

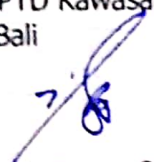
Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik pada UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali yang telah ditandatangani pada Rabu tanggal Delapan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (8 November 2023), berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan.

No	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1	Sosialisasi efektivitas pelaksanaan Perda 7/2021 secara berkelanjutan melalui pola kerjasama dengan pengusaha wisata bahari	<p>Bentuk tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sosialisasi perda 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa usaha dan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida</li><li>Pembinaan dan Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida</li></ol> <p>Waktu Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sosialisasi dilakukan pada tanggal 13 April 2023, 8 Mei 2023, dan 13 Juli 2023,</li><li>Pembinaan dan Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023.</li></ol> <p>Rencana Aksi/Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Telah dilakukan sosialisasi tentang retribusi jasa usaha di Kantor Pengelola UPTD, KKP Bali di Nusa Penida yang dihadiri oleh BPSPL, CTC, POKMASWAS dan dive operator/pelaku usaha wisata bahari di Nusa Penida dan Lembongan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Banyak dive operator yang tidak membayar tiket retribusi jasa usaha.</li><li>PAD yang diperoleh oleh UPTD KKP Bali sampai dengan bulan Oktober 2023 sebesar Rp 1.461.865.000,00</li></ol>

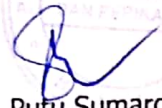
		2. Penegasan tentang retribusi jasa usaha, pemberian leaflet dan poster kepada pelaku wisata Bahari di Desa Lembongan.	
2	Meningkatkan frekuensi pengawasan dan mengikutsertakan Satpol PP sebagai institusi penegakan Perda	<p>Bentuk tindak lanjut:  UPTD KKP Bali telah melakukan patroli pemungutan retribusi jasa usaha dan patroli pengawasan pemanfaatan sumber daya Kawasan konservasi yang melibatkan aparat penegak hukum, LSM, dan Pokmaswas.</p> <p>Waktu Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 27 Januari 2023,</li> <li>2. 17 Pebruari 2023,</li> <li>3. 17 Maret 2023,</li> <li>4. 26 April 2023,</li> <li>5. 25 mei 2023,</li> <li>6. 13,14,15, 21 Juni 2023</li> <li>7. 1,2,3,6,13,21 Juli 2023</li> <li>8. 10, 24, 25 Agustus 2023</li> <li>9. 18, 21 September 2023</li> <li>10. 11 Oktober 2023</li> </ol> <p>Rencana Aksi/Keterangan :  Sudah dilakukan patroli sebanyak 21 kali Bersama Satpol PP, Polairud, TNI AL, UPP Kelas II Nusa Penida, CTC, dan POKMASWAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patroli dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan.</li> <li>- Telah dilakukan patroli sebanyak 21 kali sampai dengan bulan Oktober 2023.</li> </ul>
3	Sosialisasi dan edukasi, serta mengembangkan pola kerjasama rehabilitasi dengan mitra KOMPAK, NGO/LSM, pengusaha wisata bahari	<p>Bentuk tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPTD KKP Bali Bersama dengan Kelompok Nuansa Pulau melakukan Penanaman Karang di Perairan Desa Ped dalam rangka Hari Laut Sedunia,</li> <li>2. Perpanjangan Kerjasama dengan Bali Hai tentang restorasi terumbu karang</li> </ol> <p>Waktu Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peringatan hari laut sedunia dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023</li> <li>2. Kerjasama dengan Bali Hai selama 5 tahun (2023-2028)</li> </ol> <p>Rencana Aksi/Keterangan :  Kegiatan penanaman karang dalam rangka Hari Laut Sedunia melibatkan Kelompok Nuansa Pulau, Reef Check Indonesia, Ocean Gardener, dan siswa SD di Desa Ped.</p>	

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kepala UPTD Kawasan Konservasi  
Provinsi Bali

  
Ir. I Nengah Bagus Sugiarta  
NIP. 19681201 199303 1 011

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Bali

  
Ir. Putu Sumardiana, MP  
NIP. 19670714 199403 1 003

## NOTULEN

1. Kegiatan : Forum Konsultasi Publik Pada UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali  
Dasar : Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : B.22.005/1073/UPTD.KKPB/Diskelkan, tanggal 1 November 2023.
2. Tempat / Lokasi : Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Jl. Patimura No. 77 Denpasar  
Hari/Tgl : Rabu / 8 November 2023
3. Pelaksanaan / Sosialisasi : Pertemuan dibuka oleh Moderator pukul 09.35 Wita yang dihadiri oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Yayasan Coral Triangle Center, pelaku usaha wisata bahari dan staf UPTD KKP Bali. Sambutan disampaikan oleh Moderator dengan ucapan selamat datang dan panganan untuk tamu. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi sebagai berikut :

1. Narasumber : Kepala UPTD KKP Bali (Pak I Nengah Bagus Sugiarta) memaparkan tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) Pada UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali. Dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 39) mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan terkait yaitu :
  1. Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  2. Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan dan masyarakat selaku penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. Tujuan diadakannya FKP yaitu memperoleh pemahaman hingga solusi atas permasalahan yang ada dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Manfaat FKP secara umum yaitu menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

Tema dari FKP UPTD KKP Bali adalah 'Melalui Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Efektif Akan Memberikan Manfaat Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat'. Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik. UPTD KKP telah melakukan SKM dengan sasaran stakeholder terkait dan masyarakat pesisir yang memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan di KKP Nusa Penida dengan mendapatkan nilai IKM total 87,08 (Baik).

Permasalahan dan Kendala di UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali yaitu :

Tata Kelola :

1. Penatakelolaan Kelembagaan (Pembentukan SUOP Baru) – KK Buleleng, KK Karangasem dan KKM Teluk Benoa;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sesuai Kompetensi dan Pelatihan)
3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur (Biaya Operasional)
4. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan (RZ, COC manta/mola, lumba2, ship wreck)
5. Pengembangan kerjasama organisasi/ kelembagaan masyarakat (MoU – KB – PKS )
6. Pengembangan kemitraan (PT, BRIN, LSM/NGO, POKMASWAS, Desa Adat)
7. Pembentukan Jejaring KK (OPD, LSM/NGO, KOMPAK, Lintas Daerah)
8. Revisi / Unifikasi Perda PDRB (Tahun 2024) sesuai amanat UU 1/2022 tentang HKPD
9. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan /PES (Efektivitas implementasi PERDA Retribusi Jasa Usaha, Pembentukan BLUD)

Sumberdaya :

1. Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan (Perusakan oleh aktivitas wisata bahari)
2. Restorasi dan rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan (LSM, KOMPAK, CSR,
3. Penelitian dan Pengembangan (Daya Dukung / Daya Tampung dive site)
4. Pemanfaatan sumberdaya ikan (sesuai zonasi, IUU Fishing, Budidaya rumput laut)
5. Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan (Mangrove, Terumbu Karang, Ikan eksotis)
6. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya (Patroli Bersama – POKMASWAS – APH (PoI PP, POLAIR, TNI-AL)

Sosial, Ekonomi, Budaya :

1. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat (ekowisata ramah lingkungan, budidaya rumput laut)
2. Pemberdayaan Masyarakat (Bintek, pelatihan, sosialisasi sasaran Kelompok Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah ikan, PUGAR, POKMASWAS)
3. Pelestarian adat dan budaya (Melasti, Pura Segara, Nyepi Segara, Pecalang Segara)

UPTD KKP Bali telah menampung aduan dari masyarakat yang ada di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, antara lain : Masih adanya laporan penangkapan tidak ramah lingkungan (IUU Fishing), Penggunaan dan penurunan jangkar secara sembarangan, Wisatawan belum mentaati kode etik dalam berinteraksi dengan mola, manta dan biota eksotik lainnya, Sampah plastik / fenomena sampah pada saat musim hujan, Mooring Bouy belum tertata, Perda 7/2021 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi perlu disosialisasikan secara terus menerus dan berkelanjutan, Patroli dan pengawasan perlu diintensifkan, Pelayanan Perizinan Dasar

(Verifikasi Teknis SUOP) - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut / Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut Adapun layanan dan rencana layanan pada UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali, yaitu :

1. patroli pengawasan sumberdaya dan pemanfaatannya,
2. pemanfaatan pos jaga KKP (Crystal Bay dan Batununggul),
3. optimalisasi E-ticket- Kerjasama dengan BPD Bali (atixbali.com)-pembayaran internasional,
4. optimalisasi pemanfaatan pusat informasi KKP
5. pengaturan dan pentaan daya dukung dive site
6. pengaturan pemasangan mooring bouy
7. koordinasi lintas OPD Layanan Keselamatan Pengunjung (Kerjasama dgn KSOP-DISPAR)

Tanggapan/  
Saran

Dari  
Topan (Dune Dive Penida)

Kami berencana akan melakukan coral restoration di Nusa Penida. Bagaimana alur dalam membuat surat izin ? berapa lama proses untuk membuatnya ? Apakah ada biaya dalam proses membuatnya ?

Jawaban Pak Nengah (UPTD KKP)

Kewenangan dalam membuat izin sebenarnya merupakan kewenangan pusat. Mengajukan izin secara online melalui OSS. Untuk verifikasi teknis melalui SUOP yang penjelasannya lebih lanjut bisa menghubungi BPSPL. Sebelum verifikasi teknis sebaiknya siapkan proposal dan survei tempat penanaman apakah sudah sesuai dengan zona peruntukannya. Jika hanya untuk penanaman saja sepertinya tidak berbayar. Tetapi jika peruntukan untuk usaha yang terdapat diruang laut biayanya 18.000 permeter atau Rp 18.000.000 juta per hektare. Kita di UPTD hanya memberikan surat keterangan dan memverifikasi lapangan untuk meyakinkan dari pihak pusat bahwa lokasi sudah sesuai.

Ray (Freedive Nusa)

Jumlah boat di Manta Bay sangat banyak, jarak boat dengan customer sangat dekat. Operator yang tidak tau aturan adalah operator yang tidak memiliki ijin. Mereka mensandarkan kapal dekat dengan cleaning station. Sudah 3 minggu tidak ada manta di manta by dan manta point. Saya minta tolong buat aturan atau regulasi untuk cara menurunkan dan menjemput tamu. Kami menurunkan tamu jaraknya 50 meter dari cleaning station

Jawaban Pak Nengah (UPTD KKP)

Sudah pernah kami melakukan patroli di cleaning station. Kami sedang melakukan upaya dalam mengatur jumlah pengunjung melalui Eticket. Kita akan mencoba untuk mengatur jumlah pengunjung yang membeli tiket. Jika kuota sudah penuh pada hari itu, maka pengunjung tidak bisa membeli tiket. Dan kita akan mengatur agar pariwisata dapat merata tidak hanya ke Nusa Penida saja.

Natasya (Blue Corner Dive)

Bisa diberikan penjelasan tentang pembayaran dengan etiketing. Apakah sudah bisa membayar dengan bank account dari luar negeri ?

Jawaban  
Pak Nengah  
(UPTD  
KKPB)

Kita sudah melakukan sosialisasi bersama dengan BPD. Proses membeli tiket dengan etiketing lebih mudah. Nanti kita akan memberikan pdf proses membeli tiket dengan atixbali.com. Kita sedang berupaya untuk memasukkan master card di atixbali.com sehingga mengaktifkan dalam pembayaran melalui etiket.

Topan (Dune  
Dive Penida)

Apa tidak sebaiknya pembayaran melalui pintu masuk matahari terbit dan Padangbai. Tidak dive operator yang meminta wisatawan untuk membayar tiket

Jawaban  
Pak Nengah  
(UPTD  
KKPB)

Sudah kami laksanakan dan kami sudah ke KSOP yang mengatur tentang Pelabuhan. Pihak KSOP mengatakan sulit untuk menempatkan petugas karena takutnya akan kredit dan akan menghambat waktu keberangkatan.

Fisson (Deep  
Roots dive)

Waktu saya ke Pelabuhan sampai di sana ada bayar tiket masuk. Apa perbedaannya dengan retribusi ?

Jawaban  
Pak Nengah  
(UPTD  
KKPB)

Tiket yang di Pelabuhan untuk wisata di daratan dan itu merupakan kewenangan dari kabupaten. Sedangkan retribusi untuk pembayaran tiket masuk ke Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida. Perairan 0-12 mil merupakan kewenangan dari Provinsi. Saya meminta kesadaran dari dive operator untuk ikut bersama-sama berkontribusi dalam pembayaran retribusi.

Penutup

Penutupan dilakukan oleh Moderator dengan ucapan parama santi " OM Santih, Santih, Santih OM"

Bali, 9 November 2023  
Notulis,



Dewa Ayu Laksmi Sawitri